BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat.

Berdasarkan paparan dan temuan data di lapangan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Srengat dapat dikategorikan sebagai PPDB yang **Sistemik-Informatif**, dimana proses PPDB dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, proses PPDB sistem zonasi di SMAN 1 Srengat diawali dengan melakukan analisa kebutuhan siswa pada bidang akadmik & non akademik. Analisa dan pengajuan jumlah kuota peserta didik (pagu) menyesuaikan dengan ketersediaan fasilitas serta menyesuaikan aturan. Ditambah dengan upaya sosialisasi serta penjaringan minat, melalui surat yang dikirimkan ke sekolah jenjang SMP/MTs/sederajat dan juga memanfaatkan website sekolah sebagai publikasi dan sosialisasi *online*.

Analisa kebutuhan input peserta didik merupakan langkah awal yang begitu penting dilakukan agar kuantitas dan kualitas input yang masuk benar-benar sesuai dengan kondisi sekolah. Pada aspek kuantitas, analisa kebutuhan input didasarkan pada kesiapan sarana-prasarana sekolah, meliputi gedung kelas, jumlah guru, dan fasilitas penunjang lainnya. Keselarasan antara ketersediaan dan atau kesiapan fasilitas sekolah dengan jumlah input yang

masuk akan menunjang kelancaran dalam proses pendidikan. Secara sederhana, sebuah kelas dengan ukuran ruang dan jumlah siswa yang ideal lebih menunjang proses pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SMAN 1 Srengat memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dan juga jumlah input peserta didik yang seimbang dengan ketersediaan fasilitas. Hal ini senada dengan konsep yang dinyatakan oleh Smith Akinson dalam Imron mengenai salah satu fungsi sensus sekolah bahwa fasilitas, sarana dan prasarana, guru, biaya sekolah dan lain sebagainya bergantung pada jumlah peserta didik.[1] Lebih lanjut Sahertian menyatakan bahwa sensus sekolah berfungsi untuk salah satunya menentukan kuota peerimaan sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas dan proyeksi layanan program pendidikan bag peserta didik.[2] Maka dalam konteks pelaksanaan PPDB dapat difahami bahwa jumlah peserta didik yang akan ditampung disesuaikan dengan kondisi ketersediaan fasilitas sekolah, serta berbagai penunjang pendidikan yang dibutuhkan..

Sedangkan pada aspek kualitas, analisa kebutuhan input peserta didik menemui keterbatasan. Hal ini muncul semenjak diterapkannya PPDB sistem zonasi, dimana mayoritas kuota PPDB diisi oleh jalur zonasi yang diprioritaskan kepada analisa jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, sehingga meminimalkan pertimbangan kualitas. Pada pelaksanaannya, analisa kualitas hanya dilakukan oleh SMAN 1 Srengat untuk

---

[1] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal.32

[2] Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi: dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 104-105.

memenuhi 5% kuota jalur prestasi. Kuota prestasi ini dibagi atas prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Analisa didasarkan pada kebutuhan sekolah akan peserta didik dengan kualifikasi prestasi bidang tertentu yang belum tersedia. Kemudian harapannya input ini akan melengkapi dan memenuhi kebutuhan sekolah untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yeager dalam Imron, sensus sekolah juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik usia sekolah.[3] Dengan ini dapat difahami bahwa yang termasuk informasi peserta didik diantaranya adalah tentang hasil belajar peserta didik pada jenjang sebelumnya, kondisi ekonomi, prestasi dan informasi lain yang dibutuhkan. Maka SMAN 1 Srengat melakukan analisa atau sensus ini sebagai langkah pengumpulan infromasi guna menentukan perencanaan program pendidikan yang dibutuhkan.

Analisa kebutuhan peserta didik pada aspek kualitas memang dibutuhkan. Hal ini diselaraskan dengan strategi pembinaan di sekolah. Input akan mempengaruhi proses dan output. Input yang berkualitas akan menunjang pengembangan pembinaan peserta didik pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat memaksimalkan kualitas output. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calvin Grader dalam Imron mengenai salah satu fungsi sensus sekolah adalah untuk merencanakan program pendidikan dan melayani kebutuhan yang diperlukan.[4] Pemetaan peserta didik berguna bagi penentuan

[3]Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik...,*. hal 30
[4] *Ibid,...* hal.31

program pembinaan, maka upaya ini faktanya telah ditunaikan oleh SMAN 1 Srengat sebagai pertimbangan program pembinaan.

Kemudian pada proses sosialisasi PPDB sekolah. SMAN 1 Srengat memanfaatkan media surat secara *offline* kepada sekolah-sekolah jenjang SMP/MTs sederajat serta secara *online* dengan memanfaatkan website sekolah. Sosialisasi *offline* melalui surat merupakan hal yang biasa dilakukan sekolah dalam menginformasikan pelaksanaan PPDB sekaligus menarik minat calon peserta didik untuk mendaftar di sekolah tersebut. Sosialisasi secara *online* merupakan terobosan yang cemerlang. SMAN 1 Srengat melakukan ini sebagai upaya penyelarasan dengan PPDB tahun 2019 yang berbasis online. Ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 bahwa PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) atau online.[5] Melalui Permen ini, dapat difahami bahwa pemerintah mencoba memulai pengelolaan PPDB berbasis online untuk mendukung integrasi pendidikan berbasis online dalam menghadapi era digital. Maka sosialisasi yang dilaksanakan secara online oleh SMAN 1 Srengat merupakan langkah yang mendukung integrasi digital tersebut.

Selain itu, pada era digital saat ini, masyarakat sudah tidak asing dengan sistem online atau dunia digital, maka sosialisasi ini dianggap sudah relevan. Juga secara bersamaan, setidaknya SMAN 1 Srengat juga turut andil dalam

[5] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 51 tahun 2018, hal. 7

pengenalan sistem online kepada masyarakat, tentang informasi yang mudah dijangkau kapanpun dan dimanapun guna menghadapi era digital yang terus berkembang pesat.

Kedua, Pengorganisasian pelaksanaan PPDB dengan membentuk susunan kepanitiaan PPDB yang terdiri dari Kepala SMAN 1 Srengat sebagai penanggung jawab, Waka Kesiswaan Sebagai Ketua Pelaksana, Komite Sekolah beserta para guru sebagai anggota. Menunjang kelancaran PPDB berbasis *online* dengan membentuk Tim IT berikut juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa unit komputer. Secara menyeluruh, pelaksanaan PPDB berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Blitar selaku penentu kebijakan melelaui Petunjuk Teknis PPDB serta komunikasi secara aktif.

Syarif dalam Sulistyorini mengemukakan bahwa dalam kepanitiaan PPDB terdiri dari kepala sekolah dan beberapa guru yang ditunjuk untuk mengelola seluruh kegiatan dan kebutuhan dalam PPDB.[6] Lebih diperjelas oleh Imron, bahwa kepanitiaan PPDB dapat terdiri dari kepala sekolah sebagai ketua umum atau penanggung jawab; wakil kepala sekolah urusan kesiswaan sebagai ketua pelaksana; dan ditambah guru-guru sebagai pengisi kepanitiaan lain yang dibutuhkan.[7] Dilengkapi oleh Suryosubroto yang menegaskan bahwa pendaftaran calon peserta didik baru sudah diatur oleh Kantor Wilayah

---

[6] Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi,* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 106.

[7] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik,...* hal. 49

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berasal dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagi sekolah tingkat SMP/SMA/SMK.[8]

Dalam temuan data di lapangan, SMAN 1 Srengat telah membentuk kepanitiaan PPDB yang baik dan sejalan dengan pernyataan diatas. Kepanitiaan tertulis dalam laporan kegiatan PPDB berikut seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan. Justru SMAN 1 Srengat lebih melengkapi dan memperkuat kepanitiaan PPDB dengan juga melibatkan Waka Humas dan Komite Sekolah sebagai pendukung dalam sosialisasi dan interaksi kepada masyarakat. SMAN 1 Srengat juga mengacu kepada aturan PPDB yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Kab/Kota Blitar dibuktikan dengan dilampirkannya dan dilaksanakannya petunjuk teknis PPDB yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam laporan PPDB SMAN 1 Srengat.

Dalam menunjang keberhasilan PPDB, perlu didukung oleh tim pelaksana yang terorganisir dengan baik. Pembagian wewenang dan tugas yang jelas akan menunjang pelaksanaan PPDB. Kepala sekolah membangun tim internal yang solid tidak hanya dengan wakil kepala sekolah dan guru, namun juga menggandeng komite sekolah yang secara aktif berpartisipasi dan memantau proses PPDB. Langkah ini dinilai cukup tepat, karena PPDB sarat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehinga kehadiran komite sekolah

[8] Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 74

ditengah-tengah PPDB begitu dibutuhkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi bahwa hubungan kerja intern sekolah antar satuan kerja di dalam sekolah perlu dibangun guna bekerja sama dalam menyelesaikan beban pekerjaan.[9]

Ketiga, Pelaksanaan PPDB diawali dengan pengambilan PIN pendaftaran oleh calon peserta didik. Selanjutnya memasuki tahap pendaftaran secara *online* dan *offline* sesuai jalur yang hendak diikuti. Proses *online*, terutama jalur zonasi, seleksi sepenuhnya dikelola oleh sistem komputer yang berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jalur *offline* dikelola oleh sekolah, diantaranya jalur prestasi akademik & non akademik; jalur keluarga tidak mampu; jalur perpindahan tugas orang tua. Khusus jalur ini, dilaksanakan seleksi kemampuan bagi pendaftar jalur prestasi, survey tempat tinggal bagi pendaftar jalur tidak mampu, dan verifikasi SK perpindahan tugas bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua. Kesemuanya atas koordinasi, pengawasan dan persetujuan dinas. Diakhiri dengan pengumuman penerimaan diumumkan via *online*, *offline* dan dilanjutkan daftar ulang.

Pada dasarnya, keseluruhan aturan dan teknis pelaksanaan PPDB sistem zonasi telah diatur secara rinci dan jelas oleh Cabang Dinas Pendidikan Kab/Kota Blitar dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dirujukkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai PPDB.

---

[9] Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas,* Cet. 3., (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hal. 80

Sehingga sekolah sudah tidak terbebani dengan hal penentuan kebijakan, namun selebihnya berfokus pada pelaksanaan. Ditambah PPDB jalur zonasi dengan sistem online yang kesemuanya dikelola oleh sistem yang ada di provinsi, sekolah berperan hanya sebagai fasilitator calon peserta didik yang akan mendaftar. Dalam tata cara dan proses pendaftaran PPDB SMAN 1 Srengat sudah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PPDB Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Cabang Dinas Wilayah Jawa Timur.[10]

Terkecuali pada jalur pendaftaran selain zonasi, dimana dilaksanakan secara offline dan memerlukan peninjauan lapangan. SMAN 1 Srengat melaksanakan verifikasi berkas kepada pendaftar jalur perpindahan orang tua; melaksanakan tes kemampuan bagi pendaftar jalur prestasi, dan survey kepada pendaftar jalur keluarga tidak mampu. Menuerut aturan yang berlaku, sekolah memiliki porsi untuk melakukan seleksi sesuai aturan yang ada. Seleksi yang dilakukan memberikan dampak yang baik pada proses PPDB, sehingga calon peserta didik yang dinyatakan lolos benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan tes, survey dan verifikasi ini, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Suryosubroto bahwa dalam penentuan calon peserta didik yang diterima, tidak hanya berdasarkan pemenuhan persyaratan dan kuota. Namun juga dengan tes terhadap kriteria-kriteria khusus yang diperlukan, atau yang diatur oleh pemerintah untuk memastikan peserta didik yang diterima

[10] Petunjuk Pelaksanaan PPDB Jawa Timur Tahun 2019, hal. 14

adalah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.[11] Dalam temuan penelitian, pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Srengat dibawah pengawasan dan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Ini sesuai dengan yang termaktub dalam Petunjuk Pelaksanaan PPDB Jatim 2019, dimana pengawasan dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.[12]

Keempat, dalam menunjang tahap-tahap PPDB diatas, SMAN 1 Srengat mengupayakan layanan informasi yang prima melalui panitia PPDB, serta dampingan dukungan IT kepada calon peserta didik guna memfasilitasi serta memudahkan proses pendaftaran bagi calon peserta didik.

Sistem PPDB yang terpusat, online dan terintegrasi meminimalkan porsi kerja panitia PPDB di sekolah, terkhusus jalur zonasi. Apabila PPDB sebelum online atau sebelum sistem zonasi sekolah melaksanakan tahapan PPDB secara mandiri, maka PPDB ini mayoritas proses serta pintu masuk pendaftaran dikelola secara online terpusat di Provinsi sehingga meminimalkan beban kerja panitia PPDB sekolah. Satu satunya upaya yang dapat dimaksimalkan oleh sekolah adalah sosialisasi dan pelayanan informasi dan pendampingan kepada pendaftar atau calon peserta didik.

Dalam pelayanan informasi PPDB tersebut, merupakan salah satu bagian dari fungsi kehumasan sekolah. Hal ini senada dengan pernyataan Qoimah yang mengemukakan bahwa salah satu fungsi humas adalah mengembangkan dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang semua program

[11] Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan*,... hal. 75-76.
[12] Petunjuk Pelaksanaan PPDB Jawa Timur Tahun 2019, hal. 14

pendidikan di sekolah.[13] Program pendidikan yang disebutkan disini tentu salah satu yang termasuk didalamnya adalah kegiatan PPDB. Oleh karena itu fungsi kehumasan sekolah perlu untuk menyampaikan informasi mengenai tahapan PPDB kepada masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan SMAN 1 Srengat menyediakan layanan informasi melalui panitia PPDB dan melalui *website* resmi sekolah pada jalur online merupakan wujud dari fungsi kehumasan sekolah yang memberikan layanan informasi sebaik mungkin. Pentingnya informasi yang akurat serta pelayanan yang prima kepada masyarakat menggerakkan SMAN 1 Srengat untuk mengupayakan layanan kehumasan yang prima. Ditambah dengan dukungan tim IT yang berperan penting dalam mendampingi calon pesrta didik dalam melakukan pendaftaran PPDB yang berbasis online.

B. Pengelolaan Peserta Didik Baru dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat

Pengelolaan peserta didik di SMAN 1 Srengat berdasarkan indikator dan temuan data di lapangan, dapat dikategorikan sebagai pengelolaan yang berbasis pada bakat-minat dan kesamarataan atau ***equality and interest-based student management.*** Konsep pengelolaan peserta didik tersebut didasarkan atas pengelolaan peserta didik di SMAN 1 Srengat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

[13] Qoimah, *Membangun Pelayanan Publik yang Prima: strategi Manajemen Humas dalam Penyampaian Program Unggulan di Lembaga Pendidikan, Islamic Management Journal,* Vol. 01, No. 02, Universitas Nurul Jadid, Juli 2018, hal. 199.

Pertama, pengelolaan peserta didik diawali dengan melaksanakan sosialisasi serta penjaringan minat penjurusan melalui pembagian angket pilihan jurusan kepada calon peserta didik baru pada saat melaksanakan PPDB.

Minat merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dari peserta didik. Minat akan berpengaruh pada proses dan partisipasi terhadap sesuatu yang diikuti oleh peserta didik. Secara logis, anak akan cenderung bersemangat, bersungguh-sungguh serta bahagia dalam melakukan sesuatu yang diminati. Sebaliknya, anak akan merasa malas dan tertekan apabila melakukan sesuatu yang tidak disenangi atau diminati.

Tidjan dalam Suyono dan Harianto, menyatakan bahwa minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan perhatian terhadap suatu objek karena timbulnya perasaan senang.[14] Lebih jelas, Winkel mengemukakan bahwa minat adalah perasaan seseorang yang merasa tertarik pada bidang tertentu sehingga timbul rasa senang ketika berkecimpung dalam bidang tersebut.[15] Inti yang didapatkan dari minat adalah perhatian dan kesenangan. Dan itu merupakan faktor individual yang terdapat pada masing-masing pesrta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Suryosubroto tentang *Individualized instruction* bahwa sekolah harus memberikan kesempatan kepada peserta didik

---

[14] Suyono, Harianto, *Implementasi Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 177

[15] Winkel, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 30

untuk dapat belajar sesuai dengan minatnya sebagai pemenuhan sekolah terhadap perbedaan individu peserta didik.[16]

Daripada itu, temuan penelitian menunjukkan SMAN 1 Srengat melakukan penjajakan minat sebagai salah satu upaya memfasilitasi dan kelak akan menyalurkan minat siswa pada aspek penjurusan atau peminatan. Selain itu, penjajakan ini berguna sebagai pemetaan minat penjurusan secara kuantitatif yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam tahap tes penjurusan selanjutnya.

Kedua, Membentuk kepanitiaan tes penjurusan atau peminatan yang melibatkan berbagai pihak diantaranya kepala sekolah, waka kesiswaan, waka humas, waka sarpras dan guru Bimbingan Konseling.

Pengelolaan peserta didik yang baik salah satunya berawal dari faktor pengelola yang baik pula. Pengelolaan peserta didik tidak hanya berpusat pada kepala sekolah sebagai *Top Leader*, namun juga perlu dukungan dan komitmen pada level *middle management*, seperti halnya waka kesiswaan dan atau pengelola teknis lainnya. Dalam melakukan sebuah pengelolaan peserta didik, tentunya akan bersinggungan dengan berbagai bidang yang ada disekolah. Mulai dari kepala sekolah sebagai penentu keputusan, waka kesiswaan sebagai pengelola teknis peserta didik, waka sarpras sebagai pengelola kesiapan fasilitas dan sarana-prasarana yang hendak digunakan oleh peserta didik, waka humas yang bertugas pada ranah sosialisasi, Bimbingan Konseling yang

[16] Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar*..., hal. 88

berfokus pada analisa bakat minat peserta didik, dan pihak-pihak lain yang bersinggungan. Hal ini sesuai dengan Chotimah dan Fathurohman mengenai budaya organisasi bahwa anggota organisasi akan dipilih berdasarkan nilai dan perilakunya dalam organisasi.[17] Ini juga dapat difahami bahwa pemilihan anggota organisasi berdasarkan dengan keahlian pada bidang yang berkaitan serta pihak-pihak yang mengelola bidang-bidang yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah program.

Dengan temuan ini dapat difahami bahwa SMAN 1 Srengat membangun pengorganisasian pendidikan yang baik dalam melaksanakan pengelolaan peserta didik. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Terry dalam Syafarudin bahwa pengorganisasian adalah membangun hubungan perilaku yag efektif diantara seluruh anggota organisasi, sehingga dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.[18] Diperjelas oleh Mondy dan Premaux sebagaimana dikutip oleh Safrudin bahwa terdapat unsur-unsur pengorganisasian yang didalamnya terdiri dari 1) Tanggungjawab; 2) Wewenang; 3) Pendelegasian; 4) Pertanggungjawaban dan 5) struktur organisasi.[19] Temuan penelitian menunjukkan bahwa unsur tanggungjawab; wewenang dan pendelegasian telah dipenuhi oleh SMAN 1 Srengat oleh kepal sekolah dalam membantuk kepanitiaan ini. Sedangakn pertanggung jawaban dan struktur organisasi juga telah terbentuk, dimana semuanya telah tercantum

---

[17] C. Chotimah, M. Fathurrohman, *Komplemen Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Integratif Pelengkap Manajemen Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Kalimedia 2018), hal. 306

[18] Syafarudin, *Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif Sains dan Islam,* (Medan: Perdana Publishing, 2015), hal. 83

[19] *Ibid*,... hal. 84-85

dalam laporan pertanggungjawaban seleksi penjurusan peserta didik di SMAN 1 Srengat.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan peserta didik, SMAN 1 Srengat berupaya untuk mengorganisasikan dengan sebaik mungkin keseluruhan tim yang dibentuk, guna memaksimalkan kinerja pengelola sehingga berdampak pada kualitas pengelolaan yang baik pula.

Ketiga, Melaksanakan tes IQ, Psikologi dan tes kemampuan MIPA sebagai tes yang memetakan kemampuan serta memproyeksikan kecenderungan peserta didik dalam pilihan jurusan/peminatan. Dalam pelaksanaan tes ini, SMAN 1 Srengat bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar serta lembaga yayasan konsultan psikologi Bina Asih Yogyakarta. Ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan tes yang tepat dan akurat melalui lembaga yang profesional di bidangnya.

Tidak hanya pada minat, pengelolaan peserta didik dalam konteks ini adalah penjurusan, SMAN 1 Srengat berdasar pula pada kemampuan atau dapat dikategorikan sebagaia proyeksi bakat. Tes IQ dan psikologi menjadi instrumen yang digunakan dalam rangka memperoleh proyeksi bakat peserta didik, juga sebagai pengukuran kemampuan serta kecenderungan peserta didik.

Michael dalam Suryabrata menjelaskan bahwa bakat adalah sebuah kemampuan individu yang akan cenderung cepat menguasai bidang tertentu

yang menjadi bakatnya.[20] Sedangkan inteligensi menurut Gardner dalam Suparno adalah kemampuan sesorang dalam memecahkan masalah pada bidang inteligensi tertentu yang dimiliki oleh masing-masing individu.[21] Dari pemaparan tersebut, bakat dan inteligensi dapat difahami sebagai kecenderungan kemampuan peserta didik dalam menguasai bidang tertentu yang menjadi kemampuan khususnya.

Sedangkan dalam pengukuran atau cara mengenali bakat atau inteligensi seseorang, Gardner menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengukur atau mengidentifikasi inteligensi seseorang adalah dengan tes tertulis maupun observasi perilaku.[22] Diperkuat pula dengan pendapat Armstrong dalam Suparno bahwa inteligensi dapat diukur salah satunya dengan tes.[23] Lebih praktis Winkel mengemukakan bahwa tes inteligensi menyatakan pengukuran dalam parameter atau skala angka yang mencerminkan taraf inteligensi peserta didik. Ini sering disebut dengan *Intelligence Quotient* (IQ), dimana semakin tinggi angka IQ akan semakin tinggi taraf intelektual seseorang.[24]

Lebih lanjut, Winkel mengemukakan bahwa inteligensi memiliki peran yang sangat besar terhadap prestasi peserta didik, terutama pada bidang ilmu eksak yang membutuhkan banyak berpikir. Namun Winkel juga menyadari bahwa terdapat faktor lain pula yang mempengaruhi. Tidak hanya berdasarkan

---

[20] Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, Cet. Ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 160

[21] Paul Suparno, *Teori Inteligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah Cara Menerapkan Teori Multiple Intelligences Howard Gardner*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal. 17.

[22] *Ibid*,... hal. 19

[23] *Ibid*,... hal. 79

[24] Winkel, *Psikologi Pendidikan...*, hal. 25

pengukuran inteligensi.[25] Setidaknya tes IQ adalah metode untuk memproyeksikan kemampuan peserta didik yang praktis dan efisien untuk dilaksanakan pasca PPDB sebagai acuan peminatan siswa, dimana waktu sangat terbatas. Selebihnya, tetap mempertimbangkan faktor lain dan upaya pembinaan selama pembelajaran berlangsung.

Dengan pemaparan teori diatas kemudian dengan dibandingkan dengan temuan penelitian di SMAN 1 Srengat mengenai tes IQ dan tes kemampuan, maka dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan oleh SMAN 1 Srengat sejalan dengan teori yang ada. Bahkan, SMAN 1 Srengat mengkombinasikan antara minat dan bakat.. Minat terkadang terpengaruh oleh ego dan gengsi yang muncul di lingkungan peserta didik. Sehingga acuan minat saja tidak cukup untuk dijadikan dasar pemilihan jurusan bagi peserta didik. Oleh karena itu, SMAN 1 Srengat memadukan antara pemetaan minat dengan tes IQ, Psikologi dan tes kemampuan akademik agar mendapat proyeksi bakat-minat serta kemampuan peserta didik yang lebih tepat dan representatif.

Keempat, Menciptakan ekosistem kelas yang kompetitif dan *equality* dengan pengelompokan peserta didik secara heterogen. Juga dilakukan pengacakan ulang pada setiap kenaikan kelas untuk melatih budaya sosialisasi peserta didik.

Model pengelompokan atau *grouping* peserta didik dikelompokkan berdasarkan prestasi belajar secara acak. Atau lebih tepatnya, pada setiap kelas

[25] Winkel, *Psikologi Pendidikan...*, hal. 25

terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan belajar tinggi, sedang hingga rendah.

Ali imron menyatakan perihal pengelompokan peserta didik bahwa pengklasifikasian atau pengelompokan peserta didik adalah upaya mengidentifikasi peserta didik dengan dasar kriteria tertentu sebagai upaya menyesuaikan pembelajaran oleh guru dengan kebutuhan belajar peserta didik.[26] Lebih rinci Soetopo dalam Imron mengemukakan dasar pengelompokan peserta didik diantaranya adalah 1) Pengelompokan berdasarkan pemilihan teman; 2) Pengelompokan berdasarkan prestasi; 3) Pengelompokan berdasarkan bakat; 4) Pengelompokan berdasarkan minat; dan 5) Pengelompokan berdasarkan IQ.[27] Pemaparan ini dapat difahami bahwa pengelompokan atau *grouping* dengan klasifikasi tertentu digunakan untuk memudahkan perlakuan atau pembinaan peserta didik dengan metode yang disesuaikan dengan karakter peserta didik.

Pada prakteknya, pengelompokan kelas (pembagian *offering* kelas seperti MIPA 1; MIPA 2; IIS 1; IIS 2 dan seterusnya bagi SMA, bukan penjurusan) banyak menggunakan pengelompokan berbasis prestasi. Ini pun masih terbagi atas pengelompokan secara homogen (seragam) dan heterogen (beragam). Kedua pengelompokan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing.

---

[26] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik*,... hal. 65
[27] *Ibid*,... hal. 112-113

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Suryosubroto mengenai pengelompokan homogen dan heterogen.[28] bahwa pengelompokan homogen adalah pengelompokan dimana siswa dalam satu kelas memiliki prestasi belajar yang sama. Pengelompokan homogen, menurutnya memiliki kelebihan diantaranya adalah: guru lebih mudah dalam menentukan strategi pembelajaran dalam kelas dikarenakan kemampuan peserta didik yang sama; dan peserta didik yang tergolong cepat belajar dapat dipacu untuk terus berkembang. Sedangkan sisi negatif dari pengelompokan homogen adalah munculnya kesenjangan antara kelompok prestasi tinggi yang merasa sombong dan kelompok prestasi rendah yang merasa lemah.

Lebih rinci pengelompokan heterogen menurut Suryosubroto adalah pengelompokan peserta didik dengan prestasi belajar yang berbeda pada masing-masing kelas. Sisi positif dari pengelompokan heterogen ini adalah : membentuk interaksi antar peserta didik dimana peserta didik yang berprestasi tinggi dapat memotivasi dan membantu temannya yang masih rendah, atau istilah yang dipakai Suryosubroto adalah anak cepat dan anak lambat (dalam belajar); melatih peserta didik untuk berhadapan dengan kondisi riil di masyarakat dimana terdapat karakter manusia yang beragam. Sedangkan sisi negatifnya adalah : guru akan dihadapkan dengan tantangan dimana peserta didik dalam kelas begitu beragam; apabila manajemen pembelajaran kelas tidak efisien, maka akan merugikan sebagian peserta didik.[29] Senada pula

---

[28] Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar...,* hal. 93-94
[29] *Ibid.,* hal. 93-94

dengan Imron yang menyatakan bahwa kelas yang terlalu beragam juga berdampak pada kesulitan guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat.[30]

Temuan data di lapangan juga menemukan permasalahan serupa. Input PPDB zonasi yang tidak terprediksi menyebabkan sebaran pemetaan peserta didik begitu acak. Sehingga tingkat keberagaman dalam kelas sangat tinggi. Guru SMAN 1 Srengat menemui permasalahan demikian ketika melakukan pembelajaran di kelas. Namun bagaimanapun, sistem heterogen tetap dipilih karena dianggap memiliki lebih meminimalisir resiko, serta memiliki keuntungan pasa aspek sosial dan kompetisi peserta didik.

Pada aspek sosial, pengelompokan peserta didik secara heterogen melatih peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Ini merupakan pemenuhan salah satu fungsi manajemen pserta didik sebagaimana dinyatakan oleh Badrudin bahwa fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial pesert adidik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya.[31]

Dari pemaparan tersebut, pengelompokan homogen dan heterogen memiliki sisi positif dan negatif tersendiri. SMAN 1 Srengat memilih sistem heterogen sebagai interpretasi kesamarataan antar peserta didik dan meminimalisir kesan kesenjangan antar peserta didik pada aspek kemampuan

---

[30] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik,...* hal. 67
[31] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik,* (Jakarta: PT. Indeks, 2014), hal. 24

belajar. Kelas heterogen juga akan memicu ekosistem kelas yang kompetitif apabila guru kelas mampu memanaj dengan baik. Siswa yang kurang bersemangat dalam menjalani KBM akan termotivasi dengan teman sekelas yang lebih bersemangat, sehingga dalam jangka panjang akan berdampak pada peningkatan motivasi belajar serta pertumbuhan ekosistem kelas yang kompetitif. Selain itu, pengacakan ulang kelas pada setiap kenaikan kelas dilakukan sebagai pelatihan dan pembiasaan peserta didik untuk bersosialisasi dengan teman dan lingkungan kelas yang baru. Ini sangat tepat dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dinamika interaksi sosial pada jenjang pendidikan berikutnya maupun sosialisasi pada kalangan masyarakat.

C. Pembinaan Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat

Dalam merespon implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi yang menghasilkan input acak dan sekaligus menjadikan anomali input pada sekolah, SMAN 1 Srengat melaksanakan pembinaan peserta didik yang **Transformatif-Komprehensif** dengan program-program sebagai berikut:

Pertama, pembinaan peserta didik diawali dengan melaksanakan analisis input PPDB yang telah diperoleh berdasarkan nilai hasil belajar siswa yang masuk serta perilaku di sekolah. Ditemukan bahwa pasca diterapkan PPDB sistem zonasi, SMAN 1 Srengat mengalami anomali kualitas input, ditandai dengan terdapatnya peserta didik dengan perolehan hasil belajar di bawah rata-

rata disertai beberapa masalah semangat belajar. Kemudian disusul dengan perencanaan program pembinaan dalam rangka merespon anomali tersebut.

Pembinaan peserta didik disesuaikan dengan input peserta didik itu sendiri. Selain sebagai program dan juga sesuai dengan visi-misi sekolah, pembinaan yang didasarkan pada analisis input penting dilakukan agar supaya metode dan model pembinaan sesuai dengan karakter dari peserta didik itu sendiri. Metode dan porsi pembinaan yang tepat akan menunjang kualitas proses dan hasil pembinaan.

Menurut teori *Individualized instruction,* setiap pribadi peserta didik memiliki karakteristik masing-masing. Atau memiliki perbedaan individual meliputi bakat, minat, kecepatan belajar dan cara belajar. Maka sekolah harus memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik dengan karakter masing-masing.[32] Untuk memahami karakter peserta didik, maka diperlukan informasi mengenai peserta didik tersebut sebagai cerminan kemampuan masing-masing peserta didik. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Yeager mengenai fungsi sensus sekolah salahsatunya adalah menyajikan data yang berguna untuk perencanaan program sekolah.[33] Dengan ini dapat difahami bahwa salah satu yang dibutuhkan adalah data peserta didik, seperti hasil belajar pada jenjang sebelumya, gaya belajar peserta didik, dan faktor peserta didik lain yang berguna bagi penentuan program pembinaan.

---

[32] Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar...*, hal. 88
[33] Ali imron, *Manajemen Peserta Didik...*, hal. 31

Hal ini senada dengan pendapat Nasution mengenai strategi pembelajaran, bahwa salah satu pedoman dalam memilih strategi pembelajaran adalah kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik.[34] Ini sekaligus mendukung teori *Individualized instruction* yang dipaparkan diatas.

Sekolah pasti telah merencanaan program jauh sebelumnya, namun sistem PPDB zonasi yang menghasilkan input acak tidak terprediksi sebelumnya. Data peserta didik diketahui setelah peserta didik diterima. Maka dengan kondisi tersebut, SMAN 1 Srengat melakukan pengamatan hasil belajar peserta didik baru yang diterima, serta melihat perkembangan peserta didik dalam pembelajaran seperti semangat belajar, kedisiplinan, kepribadian dan lain sebagainya guna dijadikan sebagai acuan program sekolah.

Kedua, menunjang pembinaan peserta didik dengan meningkatkan kompetensi guru melalui workshop inovasi pembelajaran, workshop model pembelajaran berbasis STEM, pelatihan bagi guru pembina olimpiade maupun kegiatan peningkatan motivasi kinerja sebagai kesiapan menghadapi input peserta didik yang tidak terprediksi.

Guru berlaku sebagai pembimbing, pendamping dan fasilitator utama bagi peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, faktor kompetensi guru berpengaruh pada peserta didik melalui pembinaan yang diberikan. Pengembangan kompetensi guru dengan memperkaya model, variasi serta inovasi pembelajaran penting dilakukan. Menurut Madjid, Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara

[34] Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal.84

guru menggunakan metode pembelajaran karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran.[35] Lebih lanjut Mujamil Qomar menyatakan bahwa, guru harus mampu menyajikan model pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan karakter peserta didik.[36] Maka upaya SMAN 1 Srengat dalam meningkatkan kompetensi serta memperkaya inovasi pembelajaran guru adalah sebuah hal yang penting dilakukan untuk menghadapi berbagai macam karakter peserta didik.

Sebagai seorang pendidik, guru harus memenuhi kompetensi dasar. Diantara kompetensi yang harus dipenuhi menurut Mulyasa adalah : 1) Kompetensi pedagogik, yaitu yang berkenaan dengan potensi kemampuan dalam pembelajaran; 2) Kompetensi profesional, yaitu meliputi pengembangan keilmuan mengikuti perubahan zaman; 3) Kompetensi kepribadian, berkenaan dengan etika, dan aspek normatif lain sebagai teladan bagi peserta didik; dan 4) kompetensi sosial yang meliputi kecakapan guru dalam menjalin interaksi dan komunikasi dengan peserta didik, warga sekolah maupun warga masyarakat secara umum.[37]

Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan kompetensi guru yang dilakukan oleh SMAN 1 Srengat sejalan dengan konsep kompetensi guru tersebut. Salah satunya, pelatihan model pembelajaran berbasis STEM

---

[35] Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran,* Cet. Ke-3, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) hal. 193.

[36] Mujamil Qomar, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI),* (Jakarta: Emir, 2018), hal. 173

[37] E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,* cet.3, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), c.,hal. 75-172

(*Science, Technology, Engineering and Math),* ini memenuhi kompetensi pedagogik dan sekaligus profesional. Dimana pengayaan model pembelajaran memenuhi kompetensi pedagogik, sedangkan model teknologi memenuhi kompetensi profesional.

Selain pengembangan kompetensi guru, SMAN 1 Srengat juga melaksanakan program pemeliharaan motivasi kerja. Motivasi kerja penting dalam menigkatkan produktifitas dan semangat kerja, dalam hal ini guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ini sesuai dengan konsep manajemen sumberdaya manusia (*Human Resources Management)* menurut Chotimah dan Fathurrohman bahwa yang termasuk dalam manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemeliharaan.[38] Dapat difahami bahwa, pengembangan meliputi kompetensi dan pemeliharaan dapat meliputi motivasi kerja guru.

Ketiga, meningkatkan budaya dan semangat belajar peserta didik dengan program literasi, *One Month One Book,* serta pembelajaran berbasis *Super Leader*.

Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Pada lingkungan sekolah, literasi biasa dijadikan sebagai program pendukung pembelajaran yang biasa disebut budaya literasi, atau pembiasaan kegiatan membaca. Hal yang menjadikan budaya literasi penting digalakkan adalah bahwa salah satu cara dalam menambah pengetahuan adalah membaca. Maka semakin tinggi budaya membaca, akan semakin tinggi pula kemampuan memahami

[38] C. Chotimah, M. Fathurrohman, *Komplemen Manajemen Pendidikan*..., hal. 135

pengetahuan. Membaca juga akan meningkatkan daya berpikir kritis. Ini dikarenakan bahwa, semakin banyak membaca, maka semakin banyak informasi yang diketahui. Informasi-informasi yang diketahui dan saling berkaitan, akan digunakan untuk menganalisa suatu persoalan yang terjadi dari berbagai sudut pandang. Sehingga hasil pemikirannya akan lebih tajan.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah (KBM), adalah lingkungan utama peserta didik dalam menempuh pendidikan. Maka tidak dapat dipungkiri apabila metode dan strategi pembelajaran di kelas sangat berpengaruh. Metode pembelajaran secara klasikal tidak selamanya berjalan dengan efektif. Justru metode kelompok yang lebih memberikan ruang dan kesempatan peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran cenderung lebih meningkatkan pemahaman dan mental peserta didik.

Pembelajaran berbasis *Super Leader* yang dilaksanakan oleh SMAN 1 Srengat identik dengan metode belajar kelompok atau metode diskusi. Dimana dalam satu kelas dibentuk beberapa kelompok dengan satu pemimpin pada masing-masing kelompok. Menurut Majid, metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan (kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (sub-sub kelompok).[39] Persaingan yang sehat antar kelompok biasanya mendorong anak untuk belajar.[40]

---

[39] Abdul Majid, *Strategi*,... hal. 211.
[40] *Ibid*,... hal. 212.

Sedangkan aspek *leader* dalam pembelajaran berkelompok, Suryono dan Harianto menyatakan bahwa dalam kelompok belajar atau diskusi ditentukan satu pemimpin yang menonjol dan memiliki kemampuan lebih dalam berbicara. Belajar diskusi bermanfaat untuk melatih peserta didik untuk mengemukakan pendapat serta membuat suasana belajar lebih santai.[41] Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa, upaya SMAN 1 Srengat dalam menciptakan inovasi pembelajaran merupakan terobosan yang tepat. Bahkan, pembelajaran berbasis *Super Leader* yang dilakukan oleh SMAN 1 Srengat tidak hanya memilih pemimpin kelompok dari peserta didik yang menonjol, namun secara bergilir bergantian sehingga setiap peserta didik mendapatkan kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin dan mengemukakan pendapat.

Manfaat yang didapatkan peserta didik dari pembelajaran berbasis *Super Leader* meliputi aspek teoretis yaitu ilmu pelajaran dan aspek praktis dimana peserta didik berlatih dan praktek untuk menjadi pemimpin kelompok. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 151 yang berbunyi:

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١

Artinya: Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.[42]

---

[41] Suyono, Harianto, *Implementasi Belajar dan Pembelajaran,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 111

[42] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hal. 38

Muhaimin sebagaimana dikutip oleh Mujib dkk., memahami isyarat dari ayat tersebut yang menunjukkan pengajaran yang mencakup teoretis dan praktis. Sehingga peserta didik memperoleh kebijakan, ilmu pengetahuan serta kemahiran dalam melaksanakan sesuatu yang diajarkan.[43] Sehingga ini menjadi selaras dengan pembelajaran *Super Leader* dimana memuat pembelajaran teoretis dan praktis.

Maka dari itu, pengembangan budaya literasi dan pembelajaran kelompok berbasis super leader dipilih oleh SMAN 1 Srengat dalam merespon dan menyiasati anomali input peserta didik pasca implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Input yang acak, dan berbagai temuan kasus yang mengarah kepada rendahnya semangat belajar mendorong SMAN 1 Srengat untuk menciptakan terobosan baru dalam pembelajaran, sehingga ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan semangat serta kualitas belajar peserta didik.

Keempat, melaksanakan pembinaan non akademik melalui ekstrakulikuler dan organisasi sekolah dengan pembina dan atau pelatih yang kompeten di bidangnya. Selain itu, peserta didik difasilitasi dalam pembinaan kelanjutan studi melalui *event* Talkshow & Expo Campus dari perguruan tinggi seluruh Indonesia, maupun layanan konsultasi kelanjutan studi oleh Tim Bimbingan Konseling.

Pembinaan peserta didik tidak hanya pada bidang akademik. Namun juga pada bidang non akademik. Kedua bidang ini tidak dapat dipisahkan, selain itu,

---

[43] Abdul Mujib, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 19

setiap anak memiliki kecenderungan atau kelebihan pada salah satu bidang. Banyak ditemui peserta didik yang berprestasi di bidang akademik, namun lemah pada bidang non akademik, begitupun sebaliknya. Meskipun ada juga yang unggul dalam keduanya, namun pasti ada kecenderungan. Maka, sekolah sebagai fasilitator pengembangan pendidikan anak, harus menyalurkan serta mewadahi kompetensi peserta didik yang mencakup kedua bidang tersebut.

Pembinaan akademik kebanyakan didapatkan melalui KBM di kelas dengan materi-materi akademis mata pelajaran. Sedangkan bidang non akademik mayoritas didapatkan melalui kegiatan ekstrakulikuler diluar jam sekolah. Hal ini senada dengan pernyataan Suryosubroto bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan diluar jam pelajaran yang bertujuan untuk menyalurkan bakat minat peserta didik, dan menambah kemampuan siswa pada ranah kognitif, afektif terlebih psikomotorik.[44] Diperkuat dengan pernyataan Ruliyanto dkk, bahwa sekolah harus memfasilitasi perkembangan bakat dan minat peserta didik pada bidang non akademik sehingga peserta didik memiliki ruang untuk berkreasi melalui kegiatan ekstrakurikuler.[45]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SMAN 1 Srengat melaksanakan pembinaan peserta didik bidang non akademik melalui ekstrakurikuler secara terprogram. Banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan, seperti ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, dan ekstrakurikuler pilihan seperti bidang olah raga, kesenian, organisasi siswa dan lain sebagainya. Selain itu, dalam

---

[44] Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar...*, hal. 271-272

[45] Ruliyanto dkk, *Manajemen Ekstrakurikuler Non-Akademik Siswa di SMAN Muhammadiyah 3 Jember*, Jurnal Edukasi, No. 3, Vol. IV, FKIP Universitas Jember, 2017, hal. 49

menunjang keberhasilan program ekstrakurikuler tersebut, SMAN 1 Srengat oleh kepala sekolah melalui waka kesiswaan menyediakan pembina masing-masing ekstrakurikuler yang kompeten di bidangnya. Ini semua sejalan dengan yang tercantum dalam Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Eksrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah.[46] Terbukti dengan program ekstrakurikuler yang baik, didampingi oleh pembina yang kompeten, SMAN 1 Srengat berhasil menorehkan prestasi non akademik salah satunya adalah juara 2 Festival Hadrah Nasional di Universitas Diponegoro, Semarang.

Temuan penelitian di SMAN 1 Srengat, menujukkan bahwa SMAN 1 Srengat juga melaksanakan bimbingan kelanjutan studi berupa kegiatan Talk Show pengenalan budaya kampus dan *Expo Campus* yang diikuti oleh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, atau dalam konteks ini adalah jenjang SMA, maka akan terfikirkan untuk kelanjutan jenjang pendidikan setelah kelulusan. SMAN 1 Srengat melalui guru Bimbingan Konseling mengupayakan pembinaan ini sejak dini, tidak hanya bagi kelas 12. Dibuktukan dengan animo peserta didik kelas 10 dalam mengikuti kegiatan *Expo* yang bekerjasama dengan alumni SMAN 1 Srengat. Program ini dinilai meyakinkan karena didukung oleh penjelasan Suryosubroto bahwa bimbingan karir di sekolah

[46] Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Eksrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah

diperlukan untuk membantu siswa memperoleh wawasan, pengarahan untuk menghadapi jenjang selanjutnya yaitu dalam kelanjutan studi dan pekerjaan.[47]

Kelima, membangun budaya religius di sekolah dengan program membaca kitab suci dan ibadah sesuai agama masing-masing. Kegiatan dilakukan dengan sholat dhuha dan membaca kitab suci sebelum memulai jam pelajaran pertama di kelas. Tersedia masjid di sekolah untuk menunjang budaya religius dan untuk ibadah sholat jum'at bersama masyarakat.

Manusia memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi jasmani dan dimensi rohani, dimana keduanya penting untuk dipelihara. Dimensi rohani meliputi aspek spiritual yang apabila dipelihara dengan baik, akan menimbulkan ketenangan sehingga menunjang kegiatan jasmani dan pikiran. Pada lingkungan sekolah adalah menunjang kegiatan belajar siswa. SMAN 1 Srengat berupaya membangun pembinaan dimensi rohani tersebut melalui program budaya religius yang berisi kegiatan ibadah jama'ah sholat sunnah, fardhu serta pembacaan kitab suci Al Qur'an bagi yang beragama Islam, dan kitab suci agama masing-masing bagi selain Islam. Hal ini sebagaimana pernyataan Sahlan bahwa budaya religius di sekolah adalah diwujudkannya nilai dan amalan ajaran agama yang menjadi tradisi di sekolah.[48] Dipertegas oleh Chotimah dan Fathurrohman bahwa budaya religius dapat dilakukan pada kegiatan belajar mengajar di sekolah, ekstrakurikuler, kebijakan pimpinan serta tradisi warga sekolah.[49]

---

[47] Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar...,* hal. 253

[48] Asmaun Sahlan, *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 72.

[49] C. Chotimah, M. Fathurrohman, *Komplemen Manajemen Pendidikan*..., hal. 341

Temuan penelitian juga menunjukkan, upaya pembangunan budaya religius ini, diharapkan akan meningkatkan fokus belajar peserta didik. Konsep ini sejalan dengan yang dikemukakakn oleh Khan dalam Chotimah dan Fathurohman, bahwa budaya religius dapat menenangkan emosi seseorang dimana ketenangan tersebut akan meningkatkan daya nalar dan hasil belajar. Diperkuat oleh pemaparan Muhaimin dkk, bahwa kegiatan religius seperti khataman Al-Qur'an dan *istighotsah* akan menimbulkan suasana tenang di kalangan sekolah.[50]

Keenam, melakukan pembinaan pada ranah kedisiplinan dan kepribadian & layanan konseling oleh Tim BK bersama Tim Ketertiban sekolah, serta program bersama orang tua yaitu *parenting* dan monitoring siswa melalui paguyuban orang tua wali.

Pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk utamanya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan serta keterampilan bagi dirinya, bangsa dan negara, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Definisi pendidikan yang disebutkan lebih utama dan mayoritas adalah mengenai capaian spiritual dan kepribadian. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan kepribadian, spiritual dan kedisiplinan termasuk di dialamnya. temuan penelitian menunjukkan bahwa SMAN 1 Srengat menjalankan pembinaan pada ranah tersebut pula, dimana pelaksanaannya

[50] Muhaimin dkk, Paradigma Pendidikan,... hal 298-300

dikelola oleh guru Bimbingan Konseling dan Ketertiban. Ini dengan jelas dapat disimpulkan bahwa pembinaan kepribadian peserta didik di SMAN 1 Srengat sejalan dengan tujuan pendidikan.

Hal sebagaimana dinyatakan oleh Mujamil Qomar Bahwa kedisiplinan bagi peserta didik harus dikuatkan, melalui program pembiasaan, pelatihan dan pembudayaan.[51] Dipertegas oleh Imron yang menyatakan bahwa, kedisiplinan siswa dalam kehadiran pembelajaran perlu dibina. Dengan tetap mencari tahu kasus penyebab pelanggaran kedisiplinan masing-masing siswa.[52] SMAN 1 srengat melakukan upaya pembudayaan kedisiplinan melalui pengawasan langsung dari guru ketertiban maupun guru BK, serta tindak lanjut berupa pencatatan buku pelanggaran. Maka dalam hal ini, pembinaan kedisiplinan peserta didik di SMAN 1 Srengat merupakan sebuah hal yang positif.

Selain itu, sebagai pendukung program pembinaan kepribadian tersebut, SMAN 1 Srengat juga menjalin hubungan dengan orang tua/wali siswa untuk melakukan pembinaan dan monitoring peserta didik melalui kegiatan parenting dan paguyuban orang tua / wali peserta didik. Meski memang program parenting di SMAN 1 Srengat masih bersifat *temporary*, atau event. Namun monitoring siswa oleh orang tua dan guru berjalan dengan kontinyu, dilaksanakan oleh guru Bimbingan Konseling, waka Kesiswaan, Humas maupun Komite Sekolah.

---

[51] Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan...*, hal. 9
[52] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik...*, hal. 90

Pendidikan untuk peserta didik (anak) tidak hanya dibebankan kepada guru atau sekolah. Melainkan juga orang tua yang tidak pernah terlepas dari kewajiban mendidik anak. Bagaimanapun, peserta didik (anak) masih memiliki waktu bersama orang tua sehari-hari diluar jam sekolah. Pada waktu itulah, pendidikan dari orang tua sangat dibutuhkan. Sedangkan waktu peserta didik ketika di sekolah, pembinaan menjadi tanggung jawab guru, sehingga orang tua dan guru saling melengkapi untuk membina peserta didik. Dengan indikasi ini, SMAN 1 Srengat telah mengupayakan program yang memfasilitasi kerjasama antara sekolah dan orang tua. Ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, bahwa masyarakat dalam hal ini salah satunya adalah keluarga dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan.[53]

Dalam hal ini juga didukung oleh pernyataan Wahyu dkk, bahwa peranan dan keterlibatan orang tua dalam program pembinaan di sekolah dinilai sangat penting. Karena orang tua memiliki peran dalam memberikan pendidikan dasar bagi anak, seperti sikap, agama, budi pekerti, kasih sayang dan lain sebagainya. Maka komunikasi sekolah dengan orang tua penting dilakukan untuk saling menginformasikan perkembangan pembinaan peserta didik di sekolah maupun di rumah.[54] Sebagaimana diisyaratkan pula dalam penggalan al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

---

[53] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

[54] Dwi Wahyu N. Dkk, *Parenting Day Sebagai Aktivitas Peningkatan Hubungan Orang Tua dan Anak*, Jurnal Pendidikan Nonformal, No. 1, Vol. 13, FIP Universitas Negeri Malang, Maret 2018, hal. 6-7.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...[55]

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa pendidikan untuk anak merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik utama. Terutama dalam ranah kepribadian, akhlak, agama, melalui pengasuhan, perhatian dan pendidikan yang diberikan. Namun pada aspek pembelajaran ilmu eksak pasti orang tua memiliki keterbatasan waktu maupun pengetahuan. Oleh karena itu, penting adanya kerjasama sekolah dalam hal ini guru dengan orang tua untuk memberikan pembinaan yang komplit bagi peserta didik. Program ini juga sebagai perwujudan dari tiga pilar pendidikan, yaitu pemerintah, sekolah dan masyarakat atau keluarga, yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dari keseluruhan pembahasan pembinaan peserta didik di SMAN 1 Srengat, dapat dikerucutkan bahwa dalam merespon anomali input peserta didik sebagai dampak dari PPDB sistem zonasi, SMAN 1 Srengat melakukan inovasi pembinaan yang **Komprehensif dan Tansformatif.** Dimaksud transformatif karena mengupayakan perubahan model pembinaan yang sebelumnya belum dilaksanakan, yaitu budaya religius yang merupakan hal unik serta transformatif pada lembaga pendidikan umum, bukan lembaga pendidkan Islam.

[55] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an...,* hal. 951

Serta pembinaan yang komprehensif karena meliputi pembinaan bidang akademik, non akademik, kepribadian, kedisiplinan maupun spiritual. SMAN 1 Srengat berupaya untuk membina pada keseluruhan aspek peserta didik guna memfasilitasi berbagai bakat, minat dan kelebihan peserta didik.

Setiap peserta didik memiliki kelebihan atau kecenderungan tersendiri pada bidang tertentu. Ini sejalan dengan teori *Multiple Intelligence* oleh Gardner. Menurut Gardner dalam Suparno, orang yang ber-IQ tinggi belum tentu sukses dalam menjalin hubungan dengan teman-teman lain atau sukses dalam bertanding olahraga atau bermain musik.[56] Dalam teori ini, Gardner mengklasifikasikan sembilan inteligensi[57], diantaranya adalah: (1) Inteligensi linguistik *(linguistic intelligence),* (2) Inteligensi matematis-logis *(logical-mathematical intelligence),* (3) Inteligensi ruang *(spatial intelligence),* (4) Inteligensi kinestetik-badani *(bodily-kinesthetic intelligence),* (5) Inteligensi musikal *(musical intelligence),* (6) Inteligensi interpersonal *(personal intelligence),* (7) Inteligensi intrapersonal *(intrapersonal intelligence*), (8) Inteligensi lingkungan/naturalis *(naturalist intelligence),* (9) Inteligensi eksistensial *(existential intelligence).*

Dilengkapi pula oleh konsep *tarbiyah* yang dikemukakan oleh al-Maraghi sebagaimana dikutip oleh Mujib dkk., bahwa terdapat dua klasifikasi *tarbiyah* atau pendidikan yaitu: 1) *Tarbiyah Khalqiyyah,* yaitu pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan jasmani manusia sebagai sarana

---

[56] Paul Suparno, *Teori Inteligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah Cara Menerapkan Teori Multiple Intelligences Howard Gardner,* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal.18

[57] *Ibid,...* hal. 19

pengembangan rohani; dan 2) *Tarbiyyah diniyyah tahdzibiyyah*, yaitu pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan akhlak dan keagamaan sebagai pemeliharaan rohani.[58]

Sebagai contoh, temuan penelitian pembinaan peserta didik SMAN 1 Srengat menyelenggarakan pembinaan ekstrakurikuler olahraga, sehingga ini memenuhi pembinaan kecerdasan kinestetik dan konsep *tarbiyah khalqiyyah*. SMAN 1 Srengat melaksanakan budaya religius di sekolah, sehingga ini merupakan perwujudan pembinaan pada ranah afektif dan atau pada wilayah kecerdasan intrapersonal dan spiritual serta merupakan wujud dari *tarbiyyah diniyyah tahdzibiyyah*.

Sedangkan pada konsep pembinaan yang transformatif, Mujamil Qomar menyatakan bahwa dalam manajemen pendidikan khususnya pada ranah manajemen peserta didik perlu memperhatikan fungsi transformatif. Transformatif adalah upaya sekolah atau guru dalam merubah pola, bentuk, budaya belajar peserta didik pada aspek personal (minat, motivasi, semangat); aspek material (penataan ruang kelas dan fasilitas sekolah, budaya sekolah); aspek operasional (kurikulum, materi, metode, model pembelajaran); dan aspek relasional (pola koordinasi dan birokrasi internal sekolah). Perubahan atau trasnformasi ini memuat proses yang mengarah pada nilai-nilai positif sebagai salah satu upaya mencapai keberhasilan pendidikan.[59]

---

[58] Abdul Mujib, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 17
[59] Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan...*, hal. 23-24

Temuan penelitian di lapangan, SMAN 1 Srengat menerapkan fungsi manajemen peserta didik yang transformatif, seperti pelaksanakan pembelajaran berbasis *Super Leader* dimana penataan kelas diatur berkelompok sebagai variasi pembelajaran, sebagaimana fungsi transformatif pada aspek material. Juga pelaksanaan program budaya literasi dan budaya religius yang mempengaruhi budaya lingkungan sekolah, sebagaimana fungsi transformatif aspek operasional, dan lain sebagainya. Program-program tersebut dilaksanakan guna merubah budaya belajar peserta didik PPDB zonasi yang mungkin lebih lambat, untuk secara perlahan dilatih untuk lebih optimal dan berkualitas.

Dengan paparan diatas, keberagaman kecerdasan yang dimiliki peserta didik harus diberikan ruang kesempatan pembinaan serta pengembangan oleh sekolah. Hingga pada kesimpulannya, SMAN 1 Srengat secara menyeluruh mampu melaksanakan program pembinaan yang mencakup berbagai karakter peserta didik. Serta pembinaan yang transformatif dengan melakukan beberapa perubahan model-model pembinaan peserta didik untuk menunjang pembelajaran yang berkualitas.

D. Evaluasi Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat

keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.[60] Pasca implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi, manajemen peserta didik di SMAN 1 Srengat memunculkan beberapa evaluasi terkait pengelolaan peserta didik dan hal lain yang berhubungan atau terdampak oleh kebijakan tersebut. PPDB sistem zonasi yang masih baru diterapkan, sehingga belum menghasilkan produk lulusan. Namun pada prosesnya, ditemui beberapa evaluasi yang ditemui mengingat manajemen peserta didik adalah sebuah proses yang panjang mulai dari rekrutmen, pengelolaan, pembinaan sebelum akhirnya kelulusan. Maka pada evaluasinya, lebih didasarkan pada **Input, Proses dan Respon Masyarakat,** dimana beberapa evaluasinya adalah sebagai berikut:

Pertama, teknis pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik tanpa ada kendala berarti dikarenakan pendaftaran sistem zonasi *online* sehingga proses seleksi dikelola oleh server di Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka menimbulkan anomali input peserta didik yang acak dan tidak terprediksi, khususnya pada PPDB jalur zonasi yang memungkinkan orientasi penerimaan didasarkan lebih kepada zona wilayah. Namun demikian, minat terhadap SMAN 1 Srengat tetap tinggi, dibuktikan dengan kuota yang selalu terpenuhi.

Pada tahap ini, SMAN 1 Srengat mengidentifikasi input PPDB setelah pengumuman penerimaan selesai. Hal ini dilakukan berkenaan dengan proses seleksi peserta didik jalur zonasi *online* yang dikelola oleh server di Provinsi.

[60] Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 6

Maka analisa dan evaluasi input dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh informasi mengenai input yang masuk sehingga kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan untuk program selanjutnya.

Hal tersebut sebagaimana terdapat pada evaluasi model CIPP yang dikemukakan oleh Suffelbeam dalam Tayibnapis bahwa evaluasi model ini berfokus pada empat aspek utama yaitu: *Context*; *Input; Process*; *Product,* atau disingkat dengan evaluasi model CIPP. Kemudian Tayibnapis menegaskan bahwa hendaknya evaluasi berfokus pada tujuan dan kebutuhan, desain training, implementasi, transaksi dan hasil training.[61]

Apabila ditinjau dari evaluasi input PPDB sistem zonasi yang masuk, pada tahap ini SMAN 1 Srengat melakukan evaluasi yang berfokus pada input sebagai tahap awal evaluasi guna mendapatkan bahan pertimbangan dalam penentuan program pembinaan selanjutnya. Ini sejalan dengan konsep evaluasi model CIPP bagian evaluasi input sebagaimana dikutip dalam Tayibnapis bahwa *Input Evaluation,* memberikan *structuring decision* (keputusan strukturisasi). Evaluasi input mengarah pada sumber-sumber yang didapatkan, atau yang masuk ke dalam sistem organisasi. Hal ini meliputi analisis yang menyangkut hal-hal yang dibutuhkan, alternatif yang akan diambil, strategi dan prosedur kerja yang akan dilaksanakan.[62]

SMAN 1 Srengat melakukan analisa dan evaluasi input sebagai langkah untuk menyesuaikan dan menyelaraskan antara kualitas dan kuantitas input

---

[61] Farida Yusuf T., *Evaluasi Program,...* hal. 5
[62] *Ibid.,* hal. 14

beserta strategi pembelajarannya sebagai perencanaan program dan layanan pendidikan yang hendak dijalankan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Greader mengenai sensus atau perencanaan kebutuhan sekolah yang diselaraskan antara peserta didik dan program yang dijalankan.[63] Diperkuat oleh Yeager yang mengemukakan bahwa layanan sekolah disesuaikan dengan kebutuhan.[64] Dalam hal ini adalah kebutuhan peserta didik.

Maka dengan langkah ini, berupaya menanggulangi temuan input zonasi yang tidak terkirakan sebelumnya. Dimana informasi peserta didik yang didapatkan akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program pembelajaran demi menunjang kualitas pendidikan di SMAN 1 Srengat.

Sedangkan pada minat calon peserta didik di SMAN 1 Srengat, bahwa minat di SMAN 1 Srengat tetap tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kuota peserta didik yang terpenuhi, bahkan dengan pendaftar yang melebihi kuota. Ini sebagaimana disampaikan oleh waka kesiswaan dan panitia PPDB SMAN 1 Srengat. Sehingga naik turunnya grafik pendaftar disebabkan oleh zonasi yang mengakibatkan wilayah pendaftar SMAN 1 Srengat lebih terbatas.

Kedua, pelaksanaan penjurusan berdasarkan bakat-minat dan pengelompokan siswa berdasarkan sistem heterogen dilakukan dengan langkah yang tepat. Namun dampak dari sistem zonasi yang menghasilkan input yang tidak sebagaimana diprediksi dan diseleksi berdasarkan standarisasi sekolah, kuota jurusan MIPA tidak terpenuhi, ditinjau dari hasil tes. Upaya

[63] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik...,* hal. 31
[64] *Ibid.,* hal. 31-32

penanganannya, kuota tersisa dipenuhi berdasarkan minat, meskipun perolehan nilai tes dibawah standar yang ditentukan. Sehingga hal ini mendorong SMAN 1 Srengat untuk melaksanakan pembinaan yang lebih intensif.

Terbukti dengan adanya sistem zonasi, input di SMAN 1 Srengat dibawah ekspektasi. Menurut keterangan guru Bimbingan Konseling selaku panitia pelaksana tes peminatan/penjurusan, terdapat peserta didik yang mendapat hasil tes dibawah standar yang ditentukan, sedangkan kuota peminatan MIPA masih tersisa. Langkah yang dilakukan adalah memasukkan siswa berdasarkan minat. Ini berpengaruh pada penentuan dasar pertimbangan peminatan siswa. Dasar peminatan yang seharusnya disandarkan pada minat sekaligus bakat (kemampuan) peserta didik, namun sisa kuota hanya diisi oleh peserta didik dengan pertimbangan minat saja. Hal ini berpotensi pada jangka kedepan apabila ternyata minat peserta didik tidak sejalan dengan bakat. Namun SMAN 1 Srengat mengupayakan pencegahannya melalui program-program pembinaan peserta didik.

Hal ini sejalan dengan Suryosubroto yang menyatakan bahwa pembelajaran seharusnya memperhatikan individual anak, maka sekolah harus memberikan kesempatan kepada anak untuk daat belajar sesuai dengan bakat, minat, tempo dan cara belajar yang efektif bagi mereka.[65] Dari paparan ini dapat difahami bahwa perlunya penyesuaian pembelajaran dengan bakat dan minat peserta didik. Salah satunya dalam penjurusan dimana pesrta didik akan memilih bidang keilmuan yang diminati.

---

[65] Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 88

Setidaknya minat akan menunjukkan antusiasme peserta didik terhadap bidang yang dipilih, sehingga diharapkan akan juga mendorong semangat dalam belajar. Hal sebagaimana disampaikan oleh Slameto dalam dalam Suyono dan Harianto bahwa ciri-ciri seseorang minat terhadap sesuatu diantaranya adalah : 1) Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhtikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus; 2) Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati; 3) Memeperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati; 4) Lebih menyukai ssuatu hal yang menjadi minatnya daripada lainnya; 5) Dimanifestaikan melalui partisipasi pada aktifitas dan kegiatan.[66]

Ketiga, anomali input terbukti tidak hanya memunculkan permasalahan peserta didik dalam KBM, namun juga permasalahan kedisiplinan. Oleh karena itu, SMAN 1 Srengat terdorong untuk berinovasi dan meningkatkan intensitas dalam pembinaan peserta didik. Sehingga pada evaluasinya, jajaran pengelola dan bapak/ibu guru SMAN 1 Srengat harus berupaya lebih keras dalam pembinaan peserta didik. Melalui program-program pendidikan yang inovatif dan pembelajaran yang lebih variatif.

PPDB sistem zonasi masih belum lama diberlakukan. Artinya, analisan dan evaluasi masih sebatas input atau produk PPDB sistem zonasi. Upaya pembinaan otomatis juga belum membuahkan hasil berupa lulusan. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu orientasi evaluasi manajemen peserta didik

[66] Suyono, Harianto, *Implementasi Belajar dan Pembelajaran,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 177

yaitu proses. SMAN 1 Srengat dengan cepat dan tanggap merespon anomali input peserta didik pasca implementasi sistem zonasi dengan inovasi berbagai program pembinaan. Hasil akhir atau produk dari program belum dapat dilihat, oleh karena itu, evaluasi berorientasi pada proses yang berjalan. Bahwa pendidikan itu sendiri adalah proses yang panjang, dan tidak instan. Maka orientasi peningkatan kualitas proses lebih utama.

Dari temuan tersebut, dapat difahami bahwa SMAN 1 Srengat berupaya melakukan evaluasi proses. Dimana pendidik SMAN 1 Srengat mengamati perkembangan peserta didik dalam proses pembinaan yang berjalan. Seperti halnya konsep evaluasi model CIPP pada fokus *process* yang dikemukakan oleh Suffelbeam sebagaimana dikutip oleh Tayibnapis bahwa *process evaluation, to serve implementing decision*. Evaluasi ini membantu untuk melakukan monitor, kontrol dan perbaikan atas program yang dijalankan.[67] SMAN 1 Srengat melakukan monitoring terhadap proses pembinaan yang berjalan sekaligus mengamati perkembangan peserta didik yang nantinya akan berguna untuk kelanjutan program pembinaan yang dijalankan. Dengan adanya anomali input PPDB sistem zonasi yang acak, membuat SMAN 1 Srengat harus cepat merespon serta bekerja lebih keras dalam melaksanakan pembinaan peserta didik untuk menunjang kualitas pembelajaran yang optimal.

Keempat, respon masyarakat terhadap PPDB sistem zonasi beragam. Sistem zonasi dinilai membantu masyarakat yang berdekatan dengan sekolah, atau yang berada di dalam zona sekolah yang diminati, dikarenakan

[67] Farida Yusuf T., *Evaluasi Program,...* hal. 14

kemungkinan diterima lebih besar. Sedangkan pada sisi lain, zonasi dianggap membatasi masyarakat yang berada di luar zona sekolah yang diminati, sekalipun siswa tersebut berprestasi. Dikarenakan kuota bagi pendaftar diluar zona sangat sedikit. Maka dengan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk kebijakan mengenai PPDB periode selanjutnya.

Evaluasi tersebut didapatkan berdasarkan pernyataan dari komite sekolah dan orang tua siswa sebagai masyarakat. Maka terbukti bahwa di lapangan evaluasi PPDB sistem zonasi memiliki dua sisi yang berbeda sebagaimana dipaparkan pada evaluasi PPDB diatas. Selain itu, SMAN 1 Srengat juga berupaya menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan masyarakat melalui komite sekolah untuk menampung aspirasi yang berkaintan antara sekolah dan masyarakat, khususnya mengenai problematika PPDB sistem zonasi tersebut.

Temuan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pidarta mengenai hubungan sekolah dengan masyarakat bahwa terdapat pendekatan situasional atau pendekatan *contingency.* Dimana sekolah harus berupaya untuk menaruh perhatian kepada masyarakat untuk mengamati aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, kemampuan serta kondisi masyarakat.[68] Lebih lanjut Misbah menyatakan bahwa peran komite sekolah dalam mendukung program sekolah adalah dengan memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terkait kebijakan pendidikan yang dilaksanakan.[69]

---

[68] Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia,* cet.2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 182

[69] M. Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,* Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, Vol. 14 No. 1 Jan-Apr 2009, hal 68-90

Perhatian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi yang diupayakan oleh SMAN 1 Srengat merupakan wujud dari jalinan hubungan sekolah dengan masyarakat yang baik. Implikasinya, aspirasi masyarakat ini diharapkan menjadi bahan kajian sekolah ataupun pemerintah dalam penyesuaian kebijakan pendidikan yang diberlakukan. Sehingga senantiasa diwujudkan keberpihakan kepada masyarakat yang juga menjadi tujuan utama kebijakan tersebut dibuat.

Secara umum, evaluasi pembinaan peserta didik yang dilaksanakan oleh SMAN 1 Srengat adalah evaluasi formatif, dimana evaluasi dilaksanakan tidak menunggu program selesai, namun dilakukan selama proses pembinaan berjalan. Hal sebagaimana konsep evaluasi formatif oleh Scriven dalam Prihatin bahwa evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama program atau kegiatan berlangsung dan ini dikaitkan dengan proses monitoring. Informasi yang diperoleh dari monitoring memungkinkan untuk dapat membuat dan menetapkan tentang bagaimana program tersebut dapat berjalan atau bagaimana sebaiknya proses untuk mencapai tujuan.[70] Selain itu, evaluasi yang dilakukan juga termasuk dalam evaluasi model *Goal Free Oriented*, dimana evaluasi tidak berfokus pada tujuan atau output pembinaan peserta didik, sehubungan PPDB zonasi belum memiliki produk lulusan. Sebagai mana model evaluasi bebas tujuan yang memperhatikan dampak langsung dari sebuah program yang sedang berjalan. [71]

---

[70] Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan*, Cet. Ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 165

[71] *Ibid.*, hal. 165

Keseluruhan evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat diatas memiliki andil dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Sebagaimana disampaikan oleh Dunn dalam Fattah bahwa salah satu hal penting dalam implementasi kebijakan adalah dilakukannya monitoring dan evaluasi, tidak hanya sekedar selesai pada implementasi.[72] Sebagaimana pendapat Patton dan Sawicki dalam Fattah, bahwa implementasi sebuah kebijakan pasti akan muncul permasalahan baru yang harus diselesaikan melalui alternatif-alternatif serta rekomendasi baru.[73]

Dalam perspektif Islam, isyarat mengenai evaluasi diisyaratkan pada Qur'an surat al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi:

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي
بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١

Artinya: Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudia Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar![74]

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa evaluasi dilaksanakan sebagai pengukur sejauhmana pemahaman dari hal yang telah diajarkan. Pada konteks manajemen, tentu dapat dipahami bahwa evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan suatu program dapat memenuhi tujuannya, sekaligus hambatan-hambatan yang dialami.

---

[72] Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan,* cet.3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 201

[73] *Ibid*,... hal. 201-202

[74] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an...,* hal. 14

Dari paparan tersebut dapat difahami pentingnya evaluasi kebijakan guna mendapatkan informasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lembaga pendidikan. Tentunya evaluasi tidak hanya berpusat pada penentu kebijakan yaitu pemerintah. Namun juga aspirasi dan respon masyarakat serta fakta di lapangan berupa proses pengelolaan di sekolah terkait PPDB sistem zonasi. Maka evaluasi PPDB sistem zonasi didasarkan atas evaluasi kebijakan dan evaluasi pelaksanaan.

Pertama, sistem zonasi dianggap sebagai perwujudan dari cita-cita atau tujuan pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III (Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan), Pasal 4, Ayat 1 yang berbunyi:

> "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa"[75]

Prinsip ini sejalan dengan sila ke lima Pancasila yang berbunyi:

"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Yang termasuk dalam keadilan sosial salah satunya adalah dalam hal mendapatkan kesempatan dan fasilitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Ditambah juga dengan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB bahwa PPDB dilaksanakan berdasarkan asas nondiskriminatif; objektif; transparan; akuntabel dan berkeadilan.[76]

---

[75] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB III, Pasal 4, Ayat 1.

[76] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 51 tahun 2018, hal. 5-6

Apabila ditinjau dari dasar dan sudut pandang tersebut, kebijakan PPDB sistem zonasi merupakan wujud nyata dari implementasi pendidikan yang berkeadilan. Anak tidak lagi ditakutkan dengan persaingan yang ketat dalam PPDB, masyarakat dalam hal ini calon peserta didik akan lebih leluasa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terjangkau, berkualitas, tanpa takut tidak diterima karena kalah persaingan. Lembaga pendidikan juga mulai dinetralkan dari sifat tebang pilih yang berlebihan dimana hal tersebut pada satu sisi mengingkari asas keadilan dalam pendidikan.

Namun rupanya tidak hanya sebatas itu. Sebaliknya, sistem zonasi juga membawa dampak yang dirasa memberatkan bagi sekolah atau lebih tepatnya membutuhkan waktu lebih untuk menyesuaikan. Input PPDB sistem zonasi yang acak, dan tidak dapat dipetakan sebelumnya menjadi anomali tersendiri bagi lembaga pendidikan. Tentu hal ini sangat berpengaruh bagi strategi pembelajaran di sekolah.

Seyogyanya, sebuah lembaga pendidikan pasti akan menyesuaikan dan menyelaraskan antara analisa kebutuhan, kualitas dan kuantitas input beserta strategi pembelajarannya sebagai perencanaan program dan layanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Greader mengenai sensus atau perencanaan kebutuhan sekolah yang diselaraskan antara peserta didik dan program yang dijalankan.[77]

[77] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik...*, hal. 31

Diperkuat oleh Yeager yang mengemukakan bahwa layanan sekolah disesuaikan dengan kebutuhan.[78] Dalam hal ini adalah kebutuhan peserta didik.

Maka dengan temuan input zonasi yang tidak terkirakan sebelumnya, sedikit banyak pasti akan mempengaruhi perencanaan program serta proses pembelajaran. Waktu efektif belajar akan lebih tergunakan untuk proses analisa input yang masuk, memilah-milah metode pendidikan yang tepat serta penyesuaian lainnya. Maka dalam hal ini efisiensi serta efektifitas waktu pendidikan juga terpengaruhi. Oleh karena itu, dengan evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan peninjauan ulang sistem PPDB yang diberlakukan untuk selanjutnya secara bertahap diperbaiki sehingga semua pihak mendapat keuntungan. Pada pihak masyarakat maupun sekolah.

Dengan munculnya dinamika PPDB sistem zonasi di kalangan masyarakat dan lembaga pendidikan, menggugah pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil sikap.

Seperti yang diketahui, sistem zonasi dicanangkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 yang disahkan pada 31 Desember 2018 dan diperbaharui dalam Permendikbud No. 20 tahun 2019 yang disahkan pada 20 Juni 2019.

Tidak lebih berselang 6 bulan, atau tepatnya sistem zonasi murni berlaku satu kali, menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang baru, Anwar Nadiem Makarim mengambil langkah untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang PPDB sistem zonasi. Nadiem mengaku telah berdiskusi secara

[78] *Ibid*,... hal. 31-32

intensif dengan guru, kepala sekolah, pengawas, masyarakat serta seluruh stakeholder pendidikan dalam maupun luar negeri mengenai PPDB zonasi.

Dan akhirnya dengan evaluasinya, Nadiem Makarim mempertahankan sistem zonasi namun dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Dimana secara terinci telah tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Diantaranya adalah perubahan presentase zonasi yang semula sebesar 90% menjadi paling sedikit 50%. Serta penambahan kuota prestasi yang semula hanya sebesar 5%, berubah menjadi kurang lebih 30% atau lebih fleksibel dan bertambah, serta beberapa perubahan lainnya.[79]

Beberapa alasan yang mendasari dipertahankannya PPDB sistem zonasi adalah, untuk mengakomodasi peserta didik tidak mampu dan berpretasi. Selain itu, berguna pula bagi pemerataan kualitas dan kuantitas guru, serta fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan PPDB di daerahnya.

Evaluasi ini berguna bagi perbaikan kebijakan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Fattah bahwa evaluasi kebijakan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah: 1) Memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan sumbangan terhadap pemilihan sasaran atau target dari kebijakan yang diberlakukan. Yaitu mengenai sejauh mana ketepatan target kebijakan yang dituju; dan 3) memberikan sumbangan pada aplikasi metode kebijakan serta rekomendasi perbaikan kebijakan.[80]

---

[79] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

[80] Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan...*, hal. 246-247

Dari paparan tersebut dapat difahami bahwa, pemerintah berupaya melakukan pemerataan dan perwujudan pendidikan yang berkeadilan dan non diskriminatif pada kalangan masyarakat atau peserta didik. Namun hal ini juga harus diiringi dengan pemerataan kualitas pendidikan di antara sekolah-sekolah yang ada. Akan pincang apabila satu sisi pemerataan peserta didik diupayakan, namun tidak dengan pemerataan kualitas lembaga pendidikan. Karena kesenjangan akan tetap ada apabila pemerataan keduanya tidak diupayakan.